

# Sisi Lain Pengembangan UMKM

(Tanggapan Buat Pak Gubernur)

ASYARI

Wakil Rektor IIAIN Bukittinggi

**TULISAN** Bapak Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang berjudul *Pentingnya Modal Bagi UMKM* dimuat oleh harian ini, Jumat, 13 Oktober 2017 menarik untuk dicermati dan diberikan respon. UMKM yang didominasi oleh sektor lapangan usaha pertanian dan perdagangan baik formal maupun non-formal merupakan penopang perekonomian Sumatera Barat menjadi *concern* beliau. UMKM yang memiliki skala usaha kecil, segmentasi pasar kecil dan jaringan pemasaran yang kecil namun memiliki "khasiat" ekonomi yang cukup besar bagi perekonomian Sumbar.

Masalah klasik yang melleit sektor UMKM yang selama ini terus menjadi kendala dan keluhan adalah kebutuhan dan akses kepada modal. Selama ini UMKM menjalankan usaha dengan modal yang terbatas. Sehingga sulit berkembang, bersaing dan memperluas jaringan serta memperbesar skala usaha. Bahkan tak jarang pula UMKM *bak kerakok tumbuh di batu* -- hidup segan mati pun tak mau. Hal itulah yang hendak dicarikan solusi oleh Pak Gubernur dengan mendekatkan UMKM *wabul khusus* UMKM binaan instansi terkait ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Kecil Menengah di pusat dan Jamkrida di daerah. Ikhlas ini diharapkan dapat menjadikan sektor pertanian dan perdagangan serta lapangan usaha lainnya berjalan dengan baik, skala ekonomi usaha semakin besar, dan efek bergandanya juga semakin berlipat.

Modal yang mengalir dari lembaga keuangan diharapkan dapat mendongkrak dan melejitkan pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Modal dapat berefek positif untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Tentu hal ini akan bermuara pada peningkatan perekonomian Sumbar. Data 2016 menunjukkan bahwa pangsa pertanian mencapai 24,4% dari total perekonomian. Hal yang sama juga akan berlanjut lapangan sektor usaha perdagangan besar, eceran dan industri pengolahan. Namun jika perlambatan yang terjadi pada sektor usaha pertanian dan

Namun muncul sejumlah pertanyaan dari membaca, mencermati dan menelaah persoalan UMKM di Sumbar sebagaimana diapungkan di atas. Apakah modal menjadi unsur "crusial" dalam pengembangan UMKM? Sehingga kekurangan atau ketiadaan modal menyebabkan UMKM tidak akan berkembang. Bagaimana sesungguhnya potret UMKM kita? Bisakah UMKM berkembang tanpa *affirmative policy* dalam bentuk suku bunga pinjaman yang rendah dan *special* serta adanya dukungan jaminan dari Jamkrida karena notabeneanya UMKM banyak *non-bankable*? Tulisan berikut ingin berkontribusi terhadap sisi lain sebagai variabel dalam pengembangan UMKM dalam bentuk perbaikan perilaku (*behavior*) dan pembangunan jiwa wirausaha.

## Potret UMKM Sumbar dalam Angka

Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 di Sumatera Barat terdapat 593,1 ribu usaha/perusahaan non-pertanian. Jika dibedakan menurut skala usaha, 584,8 (98,60%) ribu usaha dengan skala mikro dan kecil serta 8,3 ribu (1,4%) berskala usaha menengah besar. Usaha dengan skala mikro dan kecil tersebut didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran se-

banyak 269,8 ribuperusahaan (45,59%) dari seluruh usaha yang ada di Sumatera Barat, setelah lapangan usaha penyediaan makanan dan minuman 114,6 ribu, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perdagangan tersebut 422,0 ribu atau 33,78% dari tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat.

Selain itu data tentang pemberian kredit atau pinjaman oleh perbankan selama tiga tahun terakhir (2014-2016) mellihatkan tren yang meningkat. Pinjaman tersebut teralokasi ke modal kerja, investasi dan konsumsi. Khusus untuk UMKM peningkatan tren pemberian pinjaman tersebut juga terjadi. Tahun 2014 diberikan pinjaman ke sektor UMKM sebanyak 43,20 triliun, 2015 naik menjadi 4,9 triliun dan 2016 51,92 triliun. Kredit yang dialirkan ke UMKM tersebut dikelompokkan ke modal kerja, investasi dan tidak teridentifikasi. Untuk sektor modal kerja dan investasi dalam tiga tahun (2014-2016) tercatat mengalami tren naik, 2014 sebesar 13,232 triliun naik menjadi 14,08 triliun 2016. Peningkatan pinjaman yang terjadi tiga tahun tersebut diperoleh oleh lapangan usaha yang paling banyak menerima pinjaman adalah sektor perdagangan dibanding dengan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan. Sektor ini hanya menerima pinjaman 4,68 triliun pada tahun 2015 dan 4,92 triliun di tahun 2016.

Pinjaman yang diberikan perbankan ke-UMKM ternyata tidak lah sunyi dari masalah. Tidak semua

pinjaman yang diberikan perbankan baik perbankan pemerintah maupun swasta ke UMKM terserap dengan baik (*full loading*). Untuk tahun 2016 dari 14,08 triliun yang diberikan hanya 9,64 triliun yang berhasil terserap atau 68,47%. Sektor yang paling banyak berkontribusi tidak terserap tersebut adalah pada sektor pertanian. Dari pinjaman yang terserappun juga menghadapi persoalan dalam bentuk NPL kredit yang tergolong yaitu berkisar 6,4% - 7%. Angka ini menunjukkan bahwa NPL masih berada di atas batas aman dari yang ditetapkan BI 5%. Untuk itu dituntut kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkan kredit.

Paparan tentang potret UMKM dalam angka tersebut di atas meneliskan bahwa lapangan usaha pertanian dan perdagangan menjadi komposisi dominan dan sektor primadona bagi perekonomian Sumatera Barat. Dominasi ini mencayakan keberpihakan lebih dibanding sektor lapangan usaha lainnya. Secara umum UMKM juga sudah dekat dengan lembaga keuangan perbankan. Perbankan telah menglikan pinjaman/kredit dengan tetap mempertimbangkan unsur bisnis dan *prudential*. Dalam kenyataannya, UMKM memiliki kemampuan yang rendah dalam menyerap pinjaman dari dunia perbankan. Sementara di pihak lain bank juga menghadapi risiko bisnis dari aliran pinjaman ke UMKM dalam bentuk NPL di atas garis aman yang digar

kan BI. Untuk alasan rasional bisnis tentu NPL harus ditekan serendah mungkin agar tidak "memporak-porandakan" bisnis perbankan.

#### **Reinkarnasi Budaya dan Change Perilaku**

Selain itu, data-data di atas juga mengisyaratkan bahwa ada masalah lain dalam konteks pengembangan UMKM. Kemampuan wirausaha pelaku UMKM masih rendah dan perlu digenjut dan diungkit. Semangat juang bisnis mesti menjadi pondasi dalam menjalankan dan mengembangkan UMKM sehingga produktivitas UMKM semakin tinggi, skala usaha semakin besar dan jaringannya pemasaran meluas.

Pengalaman penulis dalam menelaah hasil-hasil penelitian tentang UMKM pada saat menguji beberapa tugas akhir di IAIN Bukittinggi serta pengalaman di lapangan sebagai pengawas bank menemukan bahwa banyak varian problem menyebabkan UMKM kita kurang maju dan berkembang. Dominasi varian tersebut dalam dua hal yaitu perilaku (*behavior*) dan problem wirausaha. Perilaku (*behavior*) masyarakat kita dalam berhutang termasuk stigma negatif dengan sebutan *caliah* - suatu perilaku yang ingin bebas dari beban tanggung secara tipu muslihat. Dalam adagium Minangkabau diungkapkan, "*kok utang ka babuya dimaa cadiak dilakakan dan talutuak-luluak saketek kapola tidak baa asa makasuk*". Adagium ini menggambarkan perilaku *caliah* tersebut terutama dalam perilaku berhutang. Perilaku ini banyak ditemukan. Kasus banyaknya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT berguguran dan gulung tikar penyebabnya tidak dapat dipungkiri adalah perilaku berhutang masyarakat kita yang *caliah* tersebut. Pembiayaan atau kredit sudah dicairkan sebagai modal usaha namun tak lama setelah itu terjadi penyimpanan dari rencana bisnis dan akhirnya terjadi kegagalan pembayaran cicilan. Perilaku *caliah* menjadikan pihak bank atau lembaga keuangan berpikir seribu kali untuk menyalurkan pinjaman/kredit.

Selain itu, variabel rendahnya semangat wirausaha di kalangan masyarakat yang bergerak di sektor usaha perdagangan dan pertanian. Masyarakat di sektor bisnis terutama bisnis skala kecil kurang memiliki kepercayaan pada diri sendiri, kurang kreatif dan inovatif, *low* komitmen, sensitif terhadap kritik, kurang memahami pasar, mudah menyerah pada keadaan, dan tidak optimis. Semua sifat ini terakumulasi dan bisnis menjadi tidak bertahan lama.

Sifat ini sejatinya bukan *gen* usahawan Minang. Orang Minangkabau terkenal sebagai pebisnis yang tangguh dan memiliki semangat wirausaha yang mumpuni. Sejarah mencatat aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pebisnis Minang berlangsung dari pelabuhan ke pelabuhan. Mereka berhadapan dengan kuatnya hantaman ombak dan badai. Perjalanan dari desa pedalaman ke kota melewati dan menempuh jarak berhari-hari dengan transportasi pedati. Furnival (1967), menyebutkan bahwa Minangkabau adalah salah satu etnik di Indonesia yang ketajaman dan semangat juang dalam berbisnis tidak kalah dari China. Bagi usahawan Minang uang bukanlah utama dalam memulai usaha. Adagium menyebutkan *Pai Manibaok Kanti* (merantau tanpa modal).

Akhirul katam, modal penting bagi pengembangan UMKM namun pengembangan UMKM bukan hanya dengan modal. Perubahan perilaku dan reinkarnasi semangat juang dalam bisnis juga penting diperhatikan dan terus disuntikan ke pelaku UMKM agar skala usaha semakin besar dan jaringannya semakin luas. Semoga. (\*)